

SIARAN PERS

Webinar Forum Kajian Pembangunan “Pelaksanaan Program Bantuan Sosial di Masa Pandemi COVID-19 dan Urgensi Pemutakhiran DTKS”

Jakarta, 29 Oktober 2021 —Dalam upaya menekan penyebaran COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat yang terus mengalami penyesuaian. Pada awal Juli 2021, kebijakan ini bernama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan kemudian diubah menjadi PPKM level 4-2. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan fokus pada perluasan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial. Pelaksanaan program bantuan sosial tersebut menyedot biaya cukup besar, yakni Rp220,39 triliun pada 2020 dan Rp187,84 triliun pada 2021.

Studi The SMERU Research Institute (SMERU) menemukan bahwa bantuan sosial telah membantu meringankan beban masyarakat miskin dan rentan dalam menghadapi dampak kebijakan PPKM pada 2021 yang dirasakan lebih berat dari pada tahun sebelumnya.

Program bantuan sosial berfungsi sebagai jaring pengaman, menambah pemasukan, mengurangi pengeluaran, dan menyediakan jaminan penerimaan uang dan natura

Mayoritas pelaksanaan bantuan sosial juga sudah lebih baik dan sesuai ketentuan. Akan tetapi, pada beberapa kasus, pelaksanaan bantuan sosial masih menghadapi berbagai kendala. “Hasil temuan kami menunjukkan bahwa masih terdapat penerima bantuan belum tepat sasaran, terdapat tumpang tindih penerima bantuan, pencairan terlambat dan tidak sesuai dengan periode bantuan, alur distribusi dan pengajuan bantuan kurang ringkas, dan bentuk, jumlah serta nilai bantuan yang diterima sasaran tidak selalu sesuai dengan ketentuan,” ujar Hastuti (peneliti SMERU).

Pandemi masih berlanjut sehingga program bansos yang ada sekarang perlu dilanjutkan

Kapan pandemi akan berakhir belum dapat dipastikan dan dampaknya pada masyarakat miskin dan rentan pun terus berlanjut. Oleh karena itu, pemerintah masih perlu melanjutkan program bansos yang ada sekarang dengan berbagai perbaikan. Bansos perlu terus diberikan terutama kepada masyarakat miskin dan rentan agar dampak pandemi yang lebih besar dapat dicegah.

Namun, dua kajian cepat yang dilakukan SMERU pada April-Mei 2020 menemukan indikasi bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak mutakhir telah berimplikasi pada ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan penyaluran bantuan.

Tidak semua pemerintah kabupaten/kota melakukan pemutakhiran DTKS secara berkala, meski sudah diamanatkan UU No. 13 Tahun 2011

“Sebagai instrumen utama untuk menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial, DTKS harus selalu dalam kondisi terkini dan valid agar perannya sebagai sumber data dapat diandalkan,” ujar Dyan Widyaningsih (peneliti SMERU).

Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran untuk memitigasi dampak COVID-19 menunjukkan pentingnya pemutakhiran DTKS sebagai sumber data penetapan penerima bantuan. “Data yang mutakhir akan meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial baik dari sisi anggaran yang

dikeluarkan, ketepatan sasaran, maupun kecepatan penyalurannya. Hal ini sangat penting, terutama ketika terjadi situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Semakin efektif program perlindungan sosial maka akan makin besar pula kontribusinya pada keberhasilan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia yang ditargetkan nol persen pada 2024,” ujar Dyan.

Motivasi pemerintah daerah untuk memutakhirkan DTKS dan kapasitas untuk melaksanakannya penting dalam pemutakhiran DTKS

Sementara itu, upaya peningkatkan kualitas proses pemutakhiran data ditekankan pada tahap bimbingan teknis, musyawarah desa/kelurahan, dan pendataan (kunjungan rumah tangga). Menurut Dyan, “Meski tanggung jawab pemutakhiran DTKS berada di tangan pemerintah kabupaten/kota, perlu dukungan dan keterlibatan dari semua level pemerintahan untuk memastikan kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan dan berkualitas”.

Pemerintah perlu memastikan ketepatan sasaran bantuan melalui pemutakhiran DTKS secara berkala dan berkualitas

Pemerintah perlu memperbaiki rantai dan frekuensi distribusi bantuan serta menjamin sampainya bantuan sesuai dengan ketentuan melalui penyediaan sistem pendukung dalam bentuk sistem distribusi, pengawasan, dan pengaduan yang efektif. Hal ini perlu dilakukan agar bantuan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh penerimanya.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi:

<p>Ratri Indah Septiana Kepala Bidang Komunikasi The SMERU Research Institute rseptiana@smeru.or.id 08161361514</p>

Materi presentasi para pembicara dapat diunduh di: <https://smeru.or.id/id/fkp-29okt2021>

Tentang The SMERU Research Institute

SMERU adalah lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian kebijakan publik. Sejak didirikan pada 2001, SMERU telah menjadi lembaga terdepan dalam melakukan kajian di bidang kemiskinan dan ketimpangan. Informasi lebih lanjut tentang SMERU dapat dilihat di www.smeru.or.id.